

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI ERA PERDAGANGAN BEBAS

Oleh
Dra. Derlina

A. Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah merupakan suatu konsep kebijakan pembangunan yang memasukkan unsur lingkungan sebagai salah satu faktor pertimbangan, dengan kata lain pembangunan yang tidak hanya memperhatikan manfaatnya saja melainkan juga memperhitungkan risikonya. Kini masalah lingkungan seperti pemanasan global, lubang ozon, kepunahan jenis buka hanya masalah satu negara saja, tetapi telah mengalami globalisasi. Tidak ada satu negarapun yang dapat menangani masalah lingkungan, meski negara adikuasa sekalipun. Penanganan itu memerlukan solidaritas dunia.

Indonesia pun tidak dapat melepaskan diri dari globalisasi lingkungan tersebut, meskipun perhatian kita masih lebih terfokus pada tingkat penyusunan kebijakan yang berorientasi pada lingkungan. Dalam beberapa hal tertentu menyeruak pada kalangan bisnis dan industri yaitu dalam hal kampanye anti kayu tropik. Kampanye itu dilancarkan sebagai jawaban atas dituduhnya negara kita melakukan pembakaran hutan secara sembarono yang menambah bahaya terjadinya pemanasan global. Sementara di negarnegara maju kesadaran akan pentingnya lingkungan yang sehat, bukan hanya pada kalangan ilmuwan dan kalangan pemerintah, melainkan menyebar luas dikalangan masyarakat yang dikenal dengan "green konsumerisme" atau konsumer hijau.

Konsumer hijau adalah sebuah fenomena sosial baru yang saat ini berkembang di negara-negara maju seperti Amerika, yaitu konsumer yang hanya mau membeli produk yang tidak mencemari lingkungan. Apakah suatu produk merupakan produk yang akrab lingkungan diketahui dari stempel yang tertera pada produk tersebut (ecolabel).

Jadi stempel akrab lingkungan menjadi suatu ciri peroduk yang kualitasnya sudah terjamin. Apakah sikap itu sungguh-sungguh atau hanya merupakan "lips service" belaka untuk mendapatkan popularitas dunia ? Makalah ini mengajukan latar belakang masuknya faktor lingkungan dalam kebijakan pembangunan, pengaruh kebijakan dari negara maju dan kebijakan lingkungan kita di era perdagangan bebas.

B. Pembahasan

1). Latar belakang masuknya faktor lingkungan dalam kebijakan pembangunan.

Masalah lingkungan yang kita hadapi seperti pemanasan global, kepunahan jenis, penipisan lapisan ozon, pencemaran, pada hakekatnya adalah masalah ekologi, khususnya ekologi manusia. Makin besarnya jumlah manusia yang disertai dengan kebutuhan yang makin meningkat per orangnya dan meningkatnya kemampuan manusia untuk melakukan intervensi terhadap alam, menyebabkan perubahan dan tekanan yang terjadi pada alam makin besar pula, yang menyebabkan fungsi ekologi alam jadi terganggu.

Masalah lingkungan mendapat perhatian besar masyarakat sekitar 1950-an. Pemicu perhatian itu adalah terutama karena terjadinya pencemaran oleh industri dan pertambangan serta pestisida, seperti terjadinya pencemaran oleh air (Hg) dan oleh kadmium (Cd) yang menyebabkan penyakit keracunan di Jepang.

Sebagai wujud dari perhatian masyarakat terhadap masalah lingkungan, pada tahun 1972 didalam suatu-konferensi di Stockholm. Dengan adanya konferensi ini masalah lingkungan tidak lagi merupakan masalah satu negara melainkan telah menjadi masalah internasional.

Namun pada hakekatnya, konferensi Stockholm tidak dapat mengatasi masalah lingkungan yang dihadapi dunia. Pada suatu pihak negara maju masih meneruskan pola hidupnya yang mewah dan mencemari lingkungannya. Sementara di lain pihak, negara sedang berkembang meningkatkan eksploitasi sumber alamnya untuk dapat meningkatkan pembangunannya dan untuk membayar utang negerinya. Maka, kerusakan sumber daya alam karena eksploitasi yang berlebihan serta pencemaran lingkunganpun terjadi dimana-mana.

Dengan timbulnya berbagai masalah lingkungan tersebut, PBB membentuk suatu komisi khusus untuk menelaah masalah lingkungan dan pembangunan yang disebut World Commission Environment and Development (WCED). Komisi ini menghasilkan suatu laporan berjudul Our Common Future (Hari Depan Kita Bersama) yang tema utamanya adalah pembangunan yang berkelanjutan.

2). Pembangunan berkelanjutan

Komisi sedunia untuk lingkungan dan pembangunan WCED mendefinisikan pembangunan yang berkelanjutan sebagai "pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka". Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan berwawasan jangka panjang mencakup antara generasi. Pembangunan itu tidak bersifat serakah untuk kepentingan diri sendiri, melainkan memperhatikan juga kepentingan anak cucu dengan berupaya meningkatkan sumber daya yang cukup dan lingkungan yang sehat yang dapat mendukung kehidupan mereka dengan sejahtera.

Emil Salim (1990). pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan dalam perspektif jangka panjang. Konsep tersebut menuntut adanya solidaritas antara generasi. Di negara kita, pembangunan berkelanjutan ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan juga mengurangi dan mencegah kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan juga mempunyai arti untuk memaksimalkan manfaat pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam.

Otto Soemarwoto (1991) menyatakan. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan yaitu syarat ekonomi, sosial budaya dan ekologi. Suatu Pembangunan yang tidak memenuhi persyaratan ekonomi akan bangkrut dan harus diberi subsidi terus menerus. Untuk menghindari kerugian maka semua proyek pembangunan harus didahului sebuah studi kelayakan. Faktor sosial budaya telah menyebabkan tak terlanjutkannya pembangunan. Misalnya proyek laboratorium dengan peralatan yang canggih tidak dapat berlanjut karena belum ada kebudayaan untuk memelihara proyek tersebut ; Persyaratan ekologi sangat diperlukan, sebab sumber daya alam adalah merupakan bagian dari ekosistem. Dengan memelihara fungsi ekosistem, maka berkelanjutan sumber daya alam akan tetap terjaga.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan yang ditempuh untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan adalah dengan melaksanakan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) pada setiap Proyek yang akan dilaksanakan kebijakan lain yang ditempuh adalah program Kali Bersih (Prokasih Adipura, Kalpataru, pengendalian pencemaran TUA (tanah, udara dan air), pengendalian pencemaran laut dan pesisir, pengolahan Limbah B3, Program Kinerja Perusahaan (PROPER) dan sebagainya

Era Perdagangan Bebas.

Menjelang diberlakukannya era perdagangan bebas di tahun 2000, ada tiga hal yang menjadi isu lingkungan hidup global yaitu pengolahan sumber daya yang baik, pengendalian pencemaran dan komitmen kepada produksi bersih. Dalam era dunia tanpa batas (the borderless world), arus barang dan informasi mengalir dari satu negara ke negara lain tanpa hambatan. Bebasnya arus informasi di satu pihak menimbulkan dampak positif bagi kita, karena akan membuat kita menjadi "Convenience" dalam arti bahwa apa yang terjadi diberbagai belahan dunia akan dapat kita nikmati seara langsung pada saat peristiwa itu terjadi.

Makin transparannya hubungan internasional, membuat suatu negara tidak bisa mengisolasi diri dalam ketertutupan. Kebijakan-kebijakan penting mendapat pengaruh atau tekanan dari masyarakat internasional. Hal ini akan terjadi pula jika suatu negara tidak mampu memperhatikan masalah-masalah lingkungan dengan baik. Kasus-kasus pembangunan yang kurang memperhatikan lingkungan menyeruak menjadi isu internasional, seperti pembangunan waduk Kedungombo, Kinerja Free port, pencemaran Kali Tapak, reklamasi pantai kapuk, atau PLTN Jepara. Dari sisi ini tekanan masyarakat internasional memiliki nilai positif untuk kepentingan lingkungan manakah gagas, saran, dan kritik dalam negeri kurang terakomodasi oleh pada pengambil keputusan. (Sudharto P.hadi, 1996).

Era perdagangan bebas jika ditinjau dari perpektif lingkungan tidak semata-mata bermakna ekonomi saja, melainkan di dalamnya ada tersirat muatan politik.

Masalah lingkungan tidak lagi merupakan masalah yang hanya di perhatikan oleh pakar lingkungan, melainkan telah menjadi masalah ekonomi. Dunia perdaganganpun, trutama perdagangan internasional, tidak lagi bebas dari permasalahan lingkungan. Kecenderungannya ialah bahwa perdagangan internasional akan makin dipengaruhi oleh pertimbangan lingkungannya. (Otto Soemarwoto, 1995).

Perdagangan intrenasional dan kekuatan konsumen yang ada memberlakukan beberapa kondisi dan strategi perdagangan berkedok lingkungan seperti ecolabel, ecofesiensi, ISO 9000, ISO 14000, TC 207, Super 301 dan lain sebagainya.

Dengan dibrlakukannya strategi perdagangan tersebut, mau tidak mau para pengusaha harus menyesuaikan produk-produknya dengan standard lingkungan yang dikehendaki oleh konsumen internasional. Negara-negara maju merupakan pasar terbesar sehingga mempunyai pengaruh besar pada penetapan kondisi dan strategi tersebut. Mereka yang menentukan aturannya, jika kita tidak mau dan mengikuti aturannya maka silahkan cari pasar baru. Begitu kuatnya pengaruh negara-negara maju.

Posisi Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang cenderung dirugikan, sehingga secara intern Indonesiadituntut agar mampu bersaing secara terbuka dengan cara menyesuaikan diri dengan standard kualitas prodk yang akan berlaku dalam mekanisme perdagangan bebas, karena lebih kurang 51% ekspor non migas kita adalah negara-negara maju.

Dewasa ini terlihat suatu perkembangan pesat dalam isu perdagangan dan lingkungan yang sering dimaafkan untuk menghambat perdagangan.

Menurut Nainggolan (1994) terdapat kekhawatiran dikalangan negara-negara brkembang bahwa tolak ukur lingkungan dipakai oleh negara-negara maju sebagai dalih menciptakan hambatan baru perdagangan, sehingga membatasi akses pasar negara-negara berkembang. Oleh karena itu diperlukan adanya ketentuan lingkungan yang menetapkan standar produksi, metode produksi, norma emisi, kemasan, label, standar mutu, kesesuaian pengkajian prosedur, kesehatan serta sanitary dan phytosanitary.

Dilain pihak, perdagangan bebas dapat merusak lingkugan apabila kebijaksanaan lingkungan dalam proses pembangunannya lemah. Secara teoritis perdagangan bebas memberikan kemampuan suatu negara untuk membiayai kegiatan pelestarian lingkungan. Namun dalam prakteknya kerusakan lingkungan secara global justru terjadi pada saat perdagangan bebas dipopulerkan selama dua dasa warsa terakhir. Hal initerjadi karena pola produksi dan pola konsumsi yang mendasariperdagangan bebas bersifat eksploitatif dan merusak lingkungan. Perdagangan bebas juga membuka peluang terjadinya transaksi limbah beracun dan berbahaya (B3).

Hubungan antara perdagangan dan lingkungan dalam hal tertentu mempunyai resiko. Akan tetapi tidak beralasan untuk beranggapan bahwa kemajuan-kemajuan di bidang perekonomian pada umumnya akan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Peningkatan pendapatan perkapita yang didorong oleh peningkatan akses dan pasar dan perluasan perdagangan akan mengakibatkan kerusakan terhadap sumber daya, apabila tidak didukung oleh pengawasan terhadap polusi dalam upaya menjaga lingkungan yang lebih baik (Nainggilan, 1994).

C. Penutup.

Merosotnya kualitas lingkungan akibat pengeksploitasian sumber daya alam yang berlebihan serta pencemaran lingkungan akibat kemajuan teknologi maka satu-satunya langkah yang dapat ditempuh hanyalah dengan melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Dengan demikian beberapa kebijakan lingkungan yang harus dipenuhi di dalam era perdagangan bebas seperti ecolabelling, eco-efficiency, cleaner production, ISO 9000, dan ISO 14000, mau tidak mau suka atautidak suka harus dilaksanakan setiap negara didalam proses produksinya, kalau tidak ingin bumi yang kita diami ini semakin parah keadaannya.

Bagi Indonesia serta negara-negara berkembang lainnya dapat melaksanakannya dengan menepis anggapan apakah kebijakan lingkungan dari negara-negara maju sungguh-sungguh atau hanya sekedar "lips service" yang mereka manfaatkan untuk menolak produk negara-negara berkembang.

ooo000ooo

DAFTAR PUSTAKA

- Nainggolan P, 1994. Pokok-pokok Strategi Dan Kebijakan Perdagangan Berkaitan dengan Isu Lingkungan Global, Makalah dalam Acara Panel Diskusi "Kecenderungan Lingkungan Hidup Global" Jakarta.
- Otto Soemarwoto, 1995, Ekoefisiensi : Strategi Peningkatan Daya Saing di Pasar Global, Bina Rena Pariwisata, Jakarta.
- Otto Soemarwoto, 1991. Indonesia Dalam Kancah ISU Lingkungan Global, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Salim, Emil 1990. Sustainable Development ; An Indonesian Perspective Paper Presented at AISEC, Jakarta, 9-10 March
- Salim, Emil, 1994. Ekolabeling dan Dampaknya dalam Kegiatan Bisnis, Makalah dalam Panel Diskusi "Kecenderungan Lingkungan Global" Jakarta.
- Sudharto, P. Hadi (1996). Pembangunan Berkeanjutan. *Jurnal Cendekia*, Akademika, No.:02/Th XIV/1996.
- WALHI, 1993, Bumi Wahana. Strategi Menuju Keberlanjutan, Jakarta.
- Zumrotin K. Susilo. (1995) Konsumen Hijau Pola Pembangunan Berkeadilan Lingkungan, Bina Rena Pariwisata, Jakarta.

ooo000ooo